

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Memajukan kesejahteraan umum, itulah salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945. Cara untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melaksanakan pembangunan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada awal reformasi krisis moneter yang berlanjut kepada krisis ekonomi mewarnai perekonomian Indonesia sehingga beberapa sektor ekonomi yang menjadi indikator Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami pertumbuhan negatif.

Menurut Subandi beberapa penyebab yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional antara lain adalah permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian dimana para pemodal besar selalu mendapat kesempatan yang lebih luas dibanding dengan para pengusaha kecil dan menengah yang serba kekurangan modal (Subandi, 2005: 104).

Tuntutan untuk dilakukan reformasi bergulir mulai tahun 1998 maka sejak itu pula Bangsa Indonesia melakukan reformasi secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sampai dengan saat ini.

Salah satu dari bentuk reformasi tersebut adalah reformasi dalam hal pengelolaan daerah secara menyeluruh. Reformasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan peraturan ini maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan

dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas per-ekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional.

Pengertian pembangunan ekonomi (economic development) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto (PDB) yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985: 81).

Noor menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau Negara, paling tidak ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu: masyarakat mempunyai sumber nafkah atau sumber pendapatan yang memadai, yaitu dengan mempunyai lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimilikinya, dan terpenuhinya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dari negaranya. Tujuan utama setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui peningkatan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah tersebut. (Noor, 2013: 216)

Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa dalam jangka panjang kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam

mengonsumsi barang dan jasa serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Posisi perekonomian Kabupaten Bandung dalam konstelasi perekonomian nasional maupun Jawa Barat dipandang sangat strategis. Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Pertimbangan-pertimbangan tersebut merujuk pada beberapa indikator, seperti kedekatan wilayah perekonomian Kabupaten Bandung dengan pusat perekonomian dan pemerintahan Jawa Barat. Dilihat dari peran sektoral, peran sektor industri di Kabupaten Bandung dalam skala regional maupun nasional juga sangat strategis berkaitan dengan industri tekstil produk tekstil (TPT), industri alas kaki, industri kerajinan, produk budi daya pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung dalam setiap tahun seharusnya mengalami trend kenaikan secara proporsional terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai tuntutan perekonomian nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno, 2000: 21 adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Menurut Mudrajad Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota.

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Dapat dilihat pada tabel 1.1 laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selama tahun 2006-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) atas harga konstan tahun 2006-2015**

Tahun	PDRB atas dasar harga Konstan (rupiah)	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	Target (%)		Keterangan
			Minimal	Maksimal	
2006	17.640.170	5,8	4,00	4,60	Tercapai
2007	18.683.930	5,92	4,50	5,10	Tercapai
2008	19.674.495	5,3	5,00	5,60	Tercapai
2009	20.527.540	4,34	5,02	5,08	Tidak tercapai
2010	48.431.749	5,58	5,20	5,26	Tercapai
2011	51.250.249	5,82	5,29	5,35	Tercapai
2012	54.468.157	6,28	5,31	5,37	Tercapai
2013	57.690.587	5,92	5,74	5,80	Tercapai
2014	61.098.514	5,91	5,90	6,50	Tercapai
2015	64.696.966	5,89	6,86	6,92	Tidak tercapai

Sumber: BAPEDA (diolah) 2016

Berdasarkan tabel 1.1 Laju Pertumbuhan ekonomi dalam PDRB konstan selama tahun 2006–2015 tidak terlalu jauh berbeda, rata-rata berada pada nilai 5,00%. Hanya saja pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDRB menurun pada nilai 4,34% hal ini tidak mencapai target yang seharusnya 5,02% dan pada tahun 2015 yang seharusnya 6,86% hanya mencapai 5,89%. Sedangkan pada tahun 2006 laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,80% hal ini mencapai target dengan nilai target 4,00%, dan laju pertumbuhan ekonomi naik 0,12% pada tahun 2007, pada tahun

2007 laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,92% hal ini mencapai target dengan nilai target 4,50% dan laju pertumbuhan ekonomi turun 0,62% pada tahun 2008, pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,30% hal ini mencapai target dengan nilai target 5,02% dan laju pertumbuhan ekonomi turun 0,96% pada tahun 2009, pada tahun 2009 tidak tercapai tetapi menunjukkan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi 0,54% pada tahun 2010, pada tahun 2010 laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,58% hal ini mencapai target dengan nilai target 5,20% dan laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan 0,5% pada tahun 2011, pada tahun 2011 laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,82% hal ini mencapai target dengan nilai target 5,29% dan laju pertumbuhan ekonomi penurunan 0,46% pada tahun 2012, pada tahun 2012 laju pertumbuhan PDRB sebesar 6,28% hal ini mencapai target dengan nilai target 5,31% dan laju pertumbuhan ekonomi naik 0,64% pada tahun 2013, pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,92% hal ini mencapai target dengan nilai target 5,74% dan laju pertumbuhan ekonomi turun 0,1% pada tahun 2014, pada tahun 2014 laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,91% hal ini mencapai target dengan nilai target 5,90% dan laju pertumbuhan ekonomi turun 0,2 % pada tahun 2015 dan pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Konstan dipengaruhi oleh sembilan faktor pertumbuhan lapangan usaha dalam bidang pertanian, bidang pertambangan dan penggalian, bidang industri pengelolaan, bidang konstruksi/pembangunan, Bidang listrik gas dan air,

bidang perdagangan hotel dan restoran, bidang pengangkutan dan komunikasi, bidang keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan bidang jasa-jasa.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto pada laju pertumbuhan ekonomi tersebut, merupakan dampak dari beberapa indikator diantaranya peningkatan laju pertumbuhan investasi, peningkatan pendapatan perkapita per-tahun serta semakin menurunnya angka inflasi. “Pikiran Rakyat” (Senin, 16/1/2016)

Untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Konstan daerah yang kondusif, melalui faktor-faktor produksi penulis menduga salah satu komponen yang diandalkan adalah belanja daerah. Karena untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah daerah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya dipakai sebagai pedoman dalam langkah pelaksanaan keuangan daerah. Rencana-rencana pemerintah daerah untuk melaksanakan keuangan daerah dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja daerah dipilih berdasarkan sisi kebutuhan masyarakat yang dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dapat di lihat dari tabel 1.2 ralisasi dan target belanja daerah pada tahun 2005-2015 di Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Realisasi dan Target Belanja Daerah pada Tahun 2006-2015
di Kabupaten Bandung**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Target %	%		Ket
				Minimal	Maksimal	
2006	1.619.232.772.350	1.428.504.346.044	88,22	87,50	100	tercapai
2007	1.956.802.088.268	1.799.975.720.460	91,98	89,75	100	tercapai
2008	1.621.644.167.602	1.480.102.230.212	91,27	92,05	100	Tidak tercapai
2009	1.956.686.979.054	1.784.808.639.830	91,21	92,40	100	Tidak tercapai
2010	2.411.781.556.958	2.104.315.600.811	87,25	88	100	Tidak tercapai
2011	2.655.561.941.414	2.460.240.275.222	92,64	87,25	100	Tercapai
2012	3.063.111.044.168	2.850.023.261.378	93,04	93,04	100	Tercapai
2013	3.556.435.069.635	3.242.165.132.570	91,16	90,52	100	Tercapai
2014	4.340.959.468.801	3.823.064.504.314	88,06	91	100	Tidak tercapai
2015	5.142.388.330.904	4.607.334.886.117	89,59	91,5	100	Tidak tercapai

Sumber Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (diolah), 2016

Berdasarkan tabel 1.2 dalam 10 tahun terakhir, diketahui terdapat target anggaran belanja daerah yang belum terpenuhi realisasinya yaitu pada tahun 2008 yang seharusnya target belanja daerah sebesar 92,05% hanya dapat terealisasi 91,27%, pada tahun 2009 yang seharusnya target belanja daerah sebesar 92,40% hanya dapat terealisasi 91,21%, pada tahun 2010 yang seharusnya target belanja daerah sebesar 88% hanya dapat terealisasi 87,25%, pada tahun 2014 yang seharusnya target belanja daerah sebesar 91% hanya dapat terealisasi 88,06%, dan pada tahun 2015 yang seharusnya target belanja daerah sebesar 91,5% hanya dapat terealisasi 89,59%. Sedangkan pada tahun 2006 target belanja daerah sebesar 87,50% dapat terealisasi menjadi 88,22%, pada tahun 2007 target belanja daerah sebesar 89,75% dapat terealisasi menjadi 91,98%, pada tahun 2011 target belanja daerah sebesar 87,71% dapat terealisasi menjadi 92,64%, pada tahun 2012 target belanja daerah sebesar 75,90% dapat terealisasi menjadi 94,99% dan pada

tahun 2013 target belanja daerah sebesar 85,66% dapat teralisasi menjadi 90,22%.

Hal ini dapat terlihat sebanding antara yang tercapai dan tidak tercapai.

Persentase mengenai serapan anggaran yang rendah ini tidak diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran, tetapi pada saat menjelang akhir tahun anggaran instansi pemerintah harus berusaha menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa terdapat beberapa hal yang menyebabkan penyerapan anggaran rendah dan tinggi seperti:

Adanya anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun, terbukti dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75%. Dengan persentase tersebut maka timbul pertanyaan, apakah persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75% berarti penyerapannya tergolong sedang atau rendah. Dalam penilaian penyerapan anggaran yang proporsional atau tidak ini masih belum jelas tolok ukurnya. Maka dari itu jika ingin lebih proporsional dalam menilai penyerapan anggaran, maka perlu dilihat target penyerapan anggaran yang telah disusun di awal, apakah telah sesuai target atau tidak. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah disebabkan juga oleh adanya revisi anggaran seperti contoh penghematan anggaran yang berdasarkan perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah (<http://bpk.go.id/>)

Variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah belanja daerah dan Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah dipilih berdasarkan sisi pemerintah daerah dimana sebagai pelaksana atau pelaku kebijakan. Dan juga berdasarkan asumsi yang memihak pada kepentingan publik. Pengaruh belanja daerah tersebut dihubungkan dengan Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan. Dengan mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan, maka diharapkan ditemukan alokasi belanja daerah yang paling

ideal yang langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan, dimana tercipta suatu harmonisasi atau keseimbangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti menarik kesimpulan penelitian ini dengan judul **Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2015.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadikan penulis menarik penelitian ini diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya mengalami *fluktuasi*, dan rata-rata hanya mencapai 5,00%.
2. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga dasar konstan tidak signifikan sehingga menyebabkan *fluktuasi* pada laju pertumbuhan ekonomi.
3. Target penyerapan anggaran belanja daerah rendah, karena dalam kurun waktu 10 tahun yang memenuhi target hanya mencapai 5 tahun yaitu pada tahun 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 dan 5 tahun yang tidak tercapai yaitu, pada tahun 2008, 2009, 2010, 2014 dan 2015.
4. Kualitas belanja daerah rendah sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.
5. Porsi anggaran belanja langsung sangat rendah sehingga laju pertumbuhan ekonomi mengalami *fluktuasi*.

6. Laju pertumbuhan investasi masih sedikit sehingga kenaikan PDRB Konstan tidak maksimal.
7. Pendapatan perkapita pertahunnya mengalami *fluktuasi*, sehingga kenaikan PDRB Konstan tidak maksimal.
8. Angka inflasi mengalami *fluktuasi* sehingga kenaikan PDRB Konstan tidak maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Belanja langsung dan belanja tidak langsung, sama-sama merupakan belanja untuk aktivitas perekonomian yang tentunya sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga belanja langsung dan belaja tidak langsung di duga berhubungan erat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang di lihat dari Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan di suatu daerah. Maka penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh belanja langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh belanja tidak langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh belanja langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan pada tahun 2006-2015 di Kabupaten Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh belanja tidak langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan pada tahun 2006-2015 di Kabupaten Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan pada tahun 2006-2015 di Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis selanjutnya.
2. Sebagai acuan penulis-penulis selanjutnya terkait belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan.
3. Sebagai penambah khasanah keilmuan khususnya administrasi publik dalam bidang keuangan daerah atau Ekonomi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Untuk Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang Administrasi Publik yang berfokus dalam bidang keuangan baik secara teoritis maupun praktis, serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti antara teori dengan kenyataan di lapangan.

2. Untuk Instansi

Sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan belanja langsung, belanja tidak langsung pertumbuhan ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan dapat terealisasi dengan baik.

3. Untuk Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1995, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Peranan otonomi daerah yang luas ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu

peningkatan aktivitas per-ekonomi di daerah yang akhirnya meningkatkan perekonomian nasional.

Pengertian pembangunan ekonomi (economic development) dan pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto (PDB) yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985: 81).

Salah satu faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Konstan adalah belanja daerah. Sebagaimana menurut teori Keynesian dimana sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum daerah. belanja daerah Menurut (Siregar, B, 2015: 31) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam priode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di perboleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah. Menurut PP 58/2005 dan Permendagri 59/2007 Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Menurut (Siregar, B, 2015: 31) belanja langsung adalah belanja yang di selenggarakan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Dan belanja modal

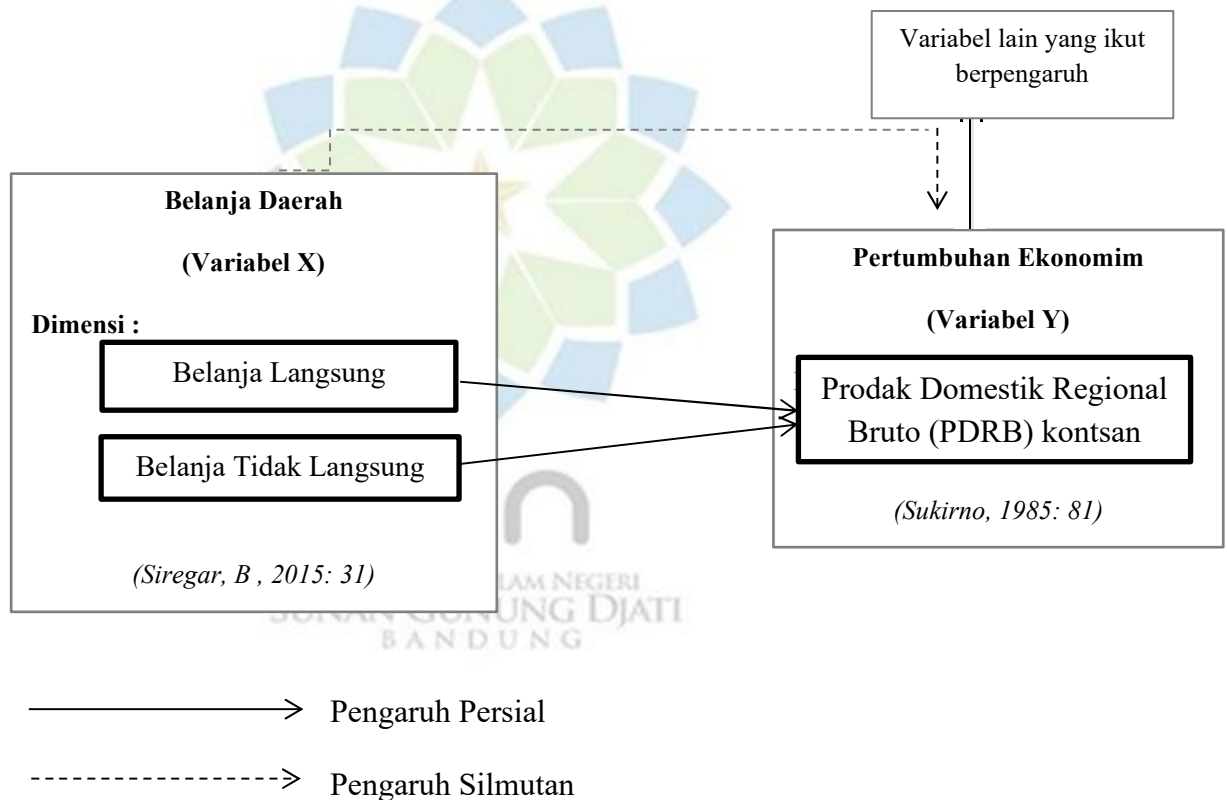
Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang di selenggarakan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari :

1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan sosial
6. Belanja bagi hasil
7. Belanja bantuan keuangan
8. Dan belanja tidak terduga

Dari hal di atas penulis menduga belanja langsung dan belanja tidak langsung yang di anggarkan dalam APBD oleh pemerintah daerah akan dipakai dan dibelanjakan untuk kepentingan daerahnya. Hal ini bisa menyebabkan penambah volume uang yang beredar di masyarakat meningkat. Begitu juga dalam belanja langsung seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang di tandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Konstan. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara cepat dan nyaman, outputnya pun akan mempengaruhi tingkat produktivitas semakin meningkat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai juga akan menarik investor untuk membuka usaha.

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang penulis gambarkan untuk membatasi dan mempermudah arah tujuan penelitian ini, dengan menduga bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung dominan berpengaruh terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung. Dapat di lihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Kerangka Konsep Penelitian



1.7 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan diatas, maka penulis menduga dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- 1 $H_0: \beta = 0$: Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara belanja langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung.
 $H_1: \beta \neq 0$: Terdapat pengaruh secara parsial antara belanja langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung.
- 2 $H_0: \beta = 0$: Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara belanja tidak langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung.
 $H_1: \beta \neq 0$: Terdapat pengaruh secara parsial antara belanja tidak langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung.
- 3 $H_0: \beta = 0$: Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung.
 $H_1: \beta \neq 0$: Terdapat pengaruh secara simultan anantara belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) kongsan di Kabupaten Bandung.